

## ANALISIS KEBIJAKAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) DI MTS AL-MA'HAD AN NUR

Anisatul Afita<sup>1</sup>, Fadila 'Uyun Mawarni<sup>2</sup>, Fania Albani Saputri<sup>3</sup>, Maryam Nisrina Abdillah<sup>4</sup>,  
Rigitha Ayu Iriani<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup> Pendidikan IPS, Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta  
Email: fadilauyun.2020@student.uny.ac.id, anisatulafita.2020@student.uny.ac.id,  
rigithaayu.2020@student.uny.ac.id, faniaalbani.2020@student.uny.ac.id,  
maryamnirina.2020@student.uny.ac.id

**ABSTRAK.** Isu gender sudah menjadi perhatian global dan dinamikanya terus dikaji dari waktu ke waktu. Pengarusutamaan gender atau PUG merupakan sebuah strategi yang dilakukan pemerintah secara sistematis dan rasional dalam mencapai sebuah keadilan dan kesetaraan terhadap peran atau gender laki-laki dan perempuan dalam semua aspek kehidupan manusia. Penelitian ini menerapkan metode penelitian kualitatif. Adapun lokasi penelitian yang diambil adalah MTs Al Ma'had An Nur, Ngrukem, Bantul, DIY. Penelitian ini menggunakan data primer yang dilaksanakan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan nampak terlihat bahwasanya di MTs Al-Ma'had An Nur dalam pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender di sekolah aktor yang terlibat dan memiliki peran penting, seperti guru, staf atau karyawan, dan peserta didik yang mana justru lebih didominasi oleh kaum perempuan. Sedangkan untuk peran dan posisi kepala sekolah masih didominasi oleh laki-laki. MTs Al-Ma'had An Nur memiliki 27 kelas dengan jumlah peserta didiknya sebanyak 896 yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia, seperti Aceh, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan Jawa. Untuk jumlah guru terdapat 54, dengan mayoritas guru perempuan.

**Kata Kunci:** *Gender, PUG, sekolah*

### PENDAHULUAN

Isu gender sudah menjadi perhatian global dan dinamikanya terus dikaji dari waktu ke waktu. Gender bukanlah sesuatu kodrat yang melekat sejak lahir, bukan sesuatu yang dimiliki, melainkan lebih kepada melihat perbedaan laki-laki dan perempuan dari karakteristik, sikap dan perilaku. Gender seringkali juga diartikan sebagai sebuah konstruksi sosial dan budaya yang membedakan peran dan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam suatu masyarakat yang dilatarbelakangi kondisi sosial budaya. Sehingga perlu adanya kesetaraan dan keadilan gender dalam masyarakat mengacu pada persamaan hak dan peluang bagi

perempuan maupun laki-laki agar mampu berperan dalam semua bidang, tak terkecuali bidang pendidikan. Memastikan penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara inklusif, adil, dan mampu mengakomodir kebutuhan laki-laki maupun perempuan merupakan satu langkah besar untuk melahirkan kesetaraan gender. Oleh karenanya, pengarusutamaan gender (PUG) bidang pendidikan penting dilakukan sebagai strategi untuk mengintegrasikan perspektif dan pertimbangan gender ke dalam setiap kegiatan pendidikan serta menumbuhkan pengetahuan dan kesadaran akan keadilan gender di ranah Pendidikan, melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi,

kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki.

Optimalisasi PUG di Indonesia diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional dan dijabarkan secara terperinci dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 84 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan PUG Bidang Pendidikan. Pedoman ini bertujuan agar seluruh aspek pembangunan pendidikan, termasuk sekolah menjadi responsif gender dan lebih menjamin persamaan hak perempuan dan laki-laki dalam mengakses pelayanan pendidikan, berpartisipasi aktif, memiliki kontrol atas sumber-sumber pembangunan, dan menikmati manfaat hasil pembangunan Pendidikan.

Didalam dunia pendidikan persoalan gender juga masih terjadi. Di Yogyakarta menurut data gender dan anak Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2022, jumlah siswa putus sekolah menurut jenjang Pendidikan dan kabupaten/kota di DIY tahun 2020 dan 2021, Kabupaten Bantul tahun 2021 menempati angka tertinggi yaitu sebanyak 72 siswa laki-laki dan 123 siswa perempuan SD putus sekolah dan tidak melanjutkan ke jenjang SMP. Hal ini berarti bahwa angka putus sekolah SD di Bantul terdapat kesenjangan yang didominasi oleh perempuan. Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa masih terjadi kesenjangan di bidang pendidikan di Kota Bantul, walaupun indikator terjadinya PUG tidak hanya dilihat dari angka putus sekolah, tetapi juga dari segi akses, kesempatan menikmati hasil pendidikan dan tentunya kesempatan laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, posisi gender menjadi sorotan dari berbagai kalangan akademi maupun

masyarakat dalam berbagai persepsi dan respon yang berbeda. Sehingga untuk mempercepat terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender di semua bidang kehidupan, maka pemerintah mengambil suatu strategi kebijakan yaitu Pengarusutamaan Gender (PUG).

Dunia pendidikan merupakan institusi formal yang strategis untuk menumbuhkan kembangkan PUG dikalangan peserta didik sejak dini. Melalui pengelolaan manajemen sekolah yang baik dan responsif gender diharapkan anak-anak masa depan negeri ini mampu menjadi generasi penerus yang sadar gender. Sehingga kedepan ketidakadilan gender bisa diminimalisir dengan baik, karena Lembaga pendidikan, sebagai tempat mentransfer pengetahuan kepada masyarakat, mengintegrasikan gender di dalamnya.

Penelitian implementasi PUG di Kabupaten Bantul dengan studi kasus di MTs Al Ma'had An Nur sangat menarik untuk dilakukan. Dengan sekolah yang berbasis madrasah harus menjadi contoh bagi sekolah negeri maupun swasta lainnya di Bantul untuk menerapkan kesetaraan Gender agar menjadi sekolah yang berkualitas, baik dari segi prestasi maupun unsur gender dalam pendidikan seharusnya juga menjadi bagian yang turut diperhatikan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode penelitian kualitatif. Penggunaan metode penelitian kualitatif dalam studi implementasi kebijakan PUG ini bertujuan untuk mendapatkan data yang lebih terbuka dan analisis yang lebih mendalam. Adapun lokasi penelitian yang diambil adalah MTs Al Ma'had An Nur, Ngrukem, Bantul, DIY.

Penelitian ini menggunakan data primer yang bersumber dari informan yaitu kepala sekolah dan guru IPS serta data sekunder yang bersumber dari jurnal, dokumen-dokumen, arsip-arsip, catatan-catatan dan laporan resmi. Penelitian ini dilaksanakan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis interaktif (interactive model of analysis) dengan prosedur: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan atau verifikasi.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Gender merupakan suatu sifat yang melekat pada diri manusia yang dikonstruksikan secara sosial maupun budaya. Misalnya, perempuan dikenal memiliki sifat lembut, keibuan, emosional, dan cantik. Sementara itu, laki-laki dikenal memiliki sifat kuat, rasional, dan perkasa. Ciri-ciri dari sifat manusia tersebut dapat dipertukarkan antara satu dengan lainnya seiring mengikuti perkembangan zaman (Fakih, 1994:7). Gender juga dapat dimaknai sebagai pola pikir manusia terhadap suatu jenis kelamin yang dikelompokkan, dibedakan, bahkan sering terjadi ketidaksetaraan didalamnya. Perempuan dianggap memiliki status sosial, kekuasaan, dan peluang untuk mengembangkan atau mengaktualisasikan dirinya lebih sedikit daripada laki-laki. Dengan adanya ketidaksetaraan tersebut merupakan bukti nyata dari adanya pengorganisasian yang dilakukan masyarakat, yang tidak lain bukanlah berasal dari kodrat, kepribadian, maupun faktor biologis yang dimiliki antara perempuan dan laki-laki. Adanya perbedaan gender atau peran tersebut karena hasil

pemikiran masyarakat yang mengakar dan tumbuh berkelanjutan hingga pada generasi berikutnya (Ritzer, 2012:794).

Pengarusutamaan gender atau PUG merupakan sebuah strategi yang dilakukan pemerintah secara sistematis dan rasional dalam mencapai sebuah keadilan dan kesetaraan terhadap peran atau gender laki-laki dan perempuan dalam semua aspek kehidupan manusia melalui program dan kebijakan yang memfokuskan pada kebutuhan, aspirasi atau pendapat, pengalaman, dan permasalahan-permasalahan laki-laki dan perempuan. Pengarusutamaan gender juga diimplementasikan untuk mencapai aspek-aspek yang sebelumnya bersifat marginal atau dianggap tidak penting dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan aktivitas utama program kerja. Tujuan dari dilakukannya pengarusutamaan gender adalah agar kaum perempuan mendapatkan kesempatan atau peluang untuk mengembangkan dirinya dan memiliki akses terbuka terhadap proses dan hasil pembangunan.

Sejak dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000, kebijakan pengarusutamaan gender telah menjadi komitmen resmi pemerintah dalam rangka memasukkan PUG ke dalam bidang pendidikan. Kebijakan ini dilaksanakan melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan PUG di bidang pendidikan. Menurut Permendiknas, setiap satuan kerja di bidang pendidikan bertanggung jawab untuk merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi semua kebijakan dan program pendidikan dalam rangka pemberlakuan gender. Pelaksanaan

pengarusutamaan gender memiliki tujuan dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif pada gender sesuai dengan peran, fungsi, tugas, bidang serta kewenangan masing-masing. Pada pemahaman pengarusutamaan gender di sekolah dapat kita tinjau dari segi aktor kebijakan yang menyusun dan mengimplementasikannya. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan nampak terlihat bahwasanya di MTs Al-Ma'had An Nur dalam pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender di sekolah aktor yang terlibat dan memiliki peran penting, seperti guru, staf atau karyawan, dan peserta didik yang mana justru lebih didominasi oleh kaum perempuan. Sedangkan untuk peran dan posisi kepala sekolah masih didominasi oleh laki-laki. MTs Al-Ma'had An Nur memiliki 27 kelas dengan jumlah peserta didiknya sebanyak 896 yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia, seperti Aceh, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan Jawa. Untuk jumlah guru terdapat 54, dengan mayoritas guru perempuan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, bersama Bapak Abdul Kirom S.Th.I., M.Hum selaku kepala sekolah, dan Ibu Siti Nur Luklukah, S.Pd., selaku guru IPS bahwa di MTs Al-Ma'had An Nur, sistem kebijakan dalam MTs Al-Ma'had An Nur diberlakukan pembagian posisi tempat duduk di ruang guru dengan meja guru laki-laki di bagian depan dan meja guru perempuan di belakangnya. Kelas belajar yang ada pada MTs Al-Ma'had An Nur juga dipisahkan antara kelas untuk peserta didik laki-laki dan kelas untuk peserta didik perempuan. Begitu pula

pada pelaksanaan kegiatan di luar pembelajaran, seperti upacara bendera, OSIM, kunjungan perpustakaan, dan lain sebagainya. Namun, di dalam pelaksanaan pembelajaran antara kelas laki-laki dan perempuan tidak ada perbedaan, baik itu dalam penyampaian materi, penggunaan media ajar, pemberian tugas-tugas, serta pelaksanaan ujian. Hanya saja peran aktif peserta didik dalam mengikuti lomba, menyampaikan pendapat, mengikuti organisasi di MTs Al-Ma'had An Nur peserta didik perempuan yang lebih dominan dan aktif daripada laki-laki karena mereka lebih teliti, disiplin, dan rajin.

Di dalam hubungan antara guru laki-laki dan perempuan terdapat dukungan penuh satu dengan lainnya, seperti dalam proses kegiatan pembelajaran. Pembelajaran yang responsif gender mengharuskan kepada guru untuk memperhatikan berbagai pendekatan belajar yang memenuhi kaidah kesetaraan dan keadilan gender, baik melalui proses pembelajaran, hasil belajar, interaksi belajar mengajar, pengelolaan kelas, maupun dalam evaluasi pembelajaran. Sehingga, keakraban dapat tercipta selama proses pembelajaran berlangsung dan menyebabkan terjadinya kedekatan di antara peserta didik dengan pada guru. Konstruksi gender yang terbentuk dalam hubungan guru seperti pada umumnya, tidak terdapat ketimpangan gender sehingga terjalin hubungan baik di dalamnya yang saling menghormati dan menghargai satu dengan lainnya. Hal tersebut juga diimplementasikan di dalam hubungan guru dengan peserta didik, dan peserta didik dengan peserta didik sehingga terciptanya hubungan yang saling mendukung, memotivasi satu sama lain.

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang kebijakan pengarusutamaan gender bahwa MTs Al-Ma'had An Nur sudah menerapkan pengarusutamaan gender pada proses pelaksanaan pembelajaran yang ada di dalamnya. Hal ini terbukti bahwa peserta didik, baik laki-laki maupun perempuan tidak dibatasi dan diatur dalam berpendapat, memperoleh sistem pembelajaran yang sama, dan justru di antara siswa laki-laki dan perempuan berlomba-lomba untuk dapat unggul di dalam prestasi.

### KESIMPULAN

Gender kerap dimaknai sebagai pola pikir manusia terhadap suatu jenis kelamin yang dikelompokkan dan dibedakan yang kemudian kerap menimbulkan suatu ketidaksetaraan antara pengelompokan tersebut. Adapun pembeda gender atau peran lahir dari pemikiran masyarakat yang mengakar dan tumbuh berkelanjutan hingga pada generasi berikutnya. Sementara itu, dalam suatu lembaga, terdapat istilah Pengarusutamaan Gender atau PUG yang merupakan sebuah strategi sistematis dan rasional dalam mencapai sebuah keadilan dan kesetaraan terhadap peran atau gender laki-laki dan perempuan dalam semua aspek kehidupan manusia melalui program dan kebijakan yang memfokuskan pada kebutuhan, aspirasi atau pendapat, pengalaman, dan permasalahan-permasalahan laki-laki dan perempuan. Adapun berdasarkan hasil penelitian yang

telah dilakukan, nampak terlihat bahwasanya di MTs Al-Ma'had An Nur dalam pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender di sekolah, aktor yang terlibat dan memiliki peran penting, seperti guru, staf atau karyawan, dan peserta didik, lebih didominasi oleh kaum perempuan, sedangkan untuk peran dan posisi kepala sekolah masih didominasi oleh laki-laki. Dalam arti lain, pengarusutamaan gender di MTs Al-Ma'had An Nur berbeda sesuai aspek-aspek tertentu.

### DAFTAR PUSTAKA

- Hentihu, V. R., Umanailo, M. C. B., Tahir, S. Z. B., Tenriawali, A. Y., & Abd Radjak, D. (2021). Penerapan Kebijakan Pengarusutamaan Gender dalam Program Pendidikan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(2), 1014-1019.
- Andina, Tri Kurnia. 2020. Sekolah Responsif Gender: Sebuah Misi dan Harapan. Diakses dari <https://www.rifka-annisa.org/id/component/k2/item/729-sekolah-responsif-gender-sebuah-misi-dan-harapan-pada-3-April-2023>.
- Hermiina, Dian. 2014. Strategi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Dalam Pendidikan. *Mu'adalah Jurnal Studi Gender Dan Anak*, Vol 2 No 1.
- Tigayanti, Erna., M. Saleh S & Ratih Nurpratiwi. 2014. Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Bidang Pendidikan di Kota Malang (Studi Kasus SMA 8 Malang). *Jurnal Wacana*, Vol 17, No 4.